

PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

**Rizky Mulia
Siti Mutmainah
Universitas Diponegoro Semarang**

ABSTRACT

The objective of this research was to analyze which characteristics of corporate governance that influence the extent of corporate social responsibility (CSR) disclosures in the companies which operate in the sector and/or related to the natural resources in Indonesia. Corporate governance characteristics which were used, namely size of board of commissioner, independent commissioner, audit committee independence, ownership concentration, managerial ownership, foreign ownership, and government ownership. The extent of CSR disclosure was measured used corporate social disclosure index (CSDI) based on Global Reporting Initiative (GRI) reporting standard items which were disclosed in companies' annual report. This research also used firm's size and profitability as control variables.

The population of this research was all companies which operate in the sector and/or related to the natural resources that listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in the year 2008. Used purposive sampling, total sample of the research became 86 companies. Multiple regression method was used to analyze the relationship between corporate governance characteristics and CSR disclosure.

The results show that only government ownership has a significant effect toward the extent of CSR, although audit committee independence also has a significant effect, but it is contrary to the hypothesis. The results also show that both of control variables has significant effects toward the extent of CSR.

Keywords: corporate social responsibility, corporate governance, board characteristics, audit committee, ownership structure.

I. PENDAHULUAN

Praktik pengungkapan CSR memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian

pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan.

Pengesahan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas pada tanggal 16 Agustus 2007, secara otomatis menggantikan UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995. Salah satu bentuk penyempurnaan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 adalah pembaharuan tentang konsep pengelolaan perseroan. Dalam rangka pemenuhan kepentingan *shareholder* khususnya dan *stakeholder* pada umumnya akan informasi dan manfaat sosial, UU No. 40 Tahun 2007 ini mengatur praktik dan pelaporan CSR dalam Pasal 66 Ayat (2) Bagian C dan Pasal 74.

Tujuan dikeluarkannya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selain meregulasi perusahaan mengenai CSR, yaitu juga untuk pemenuhan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Konsep GCG adalah konsep yang di dalamnya menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris, sehingga dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan

shareholder khususnya dan *stakeholder* pada umumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada *annual report* perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan dan melaporkan CSR sesuai ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karakteristik *corporate governance* yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, komisaris independen, independensi komite audit, konsentrasi kepemilikan (*ownership concentration*), kepemilikan manajerial, kepemilikan asing (*foreign ownership*), dan kepemilikan pemerintah.

II. TELAAH PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyediakan premis teoritis untuk memahami proses organisasional dan desain dari perspektif *principal-agent* (Subramaniam, 2006). Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Konflik keagenan muncul karena *principal* tidak memiliki informasi yang

cukup tentang kinerja *agent*. *Agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, kinerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Karena asimetri informasi menimbulkan konflik keagenan, maka *principal* berusaha untuk memonitor aktivitas *agent*.

Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi masalah keagenan antara pemilik dan manajemen, karena dianggap sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi (Healy dan Palepu, 1993 dalam Mahdiyah, 2008). Menurut Matoussi dan Chakroun (2008), *voluntary disclosure* dapat mengurangi asimetri informasi, karena apabila terjadi asimetri informasi maka *agent* bisa mengambil keuntungan dari informasi yang lebih mudah diakses oleh mereka sendiri. *Shareholders* berupaya mendorong adanya pengungkapan, dimana dengan adanya pengungkapan akan membuat *shareholders* mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk mengevaluasi manajemen dan juga untuk mengurangi *agency cost* yang dikeluarkan *shareholders*.

Corporate governance menyediakan kerangka untuk pengendalian internal

yang dapat mengurangi *agency problem*. *Corporate governance* dianggap mampu untuk mengurangi masalah keagenan karena dengan pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistik manajer, asimetri informasi, dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi untuk kepentingan mereka sendiri akan dapat dikurangi dan dapat mengarah pada peningkatan pengungkapan perusahaan (Ho dan Wong, 2001 dalam Akhtaruddin *et al.*, 2009).

2.2 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Menurut Ghazali dan Chariri (2007), yang melandasi teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Apabila perusahaan melakukan pengungkapan sosial, maka perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya akan mendapat "status" dari masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi atau dapat dikatakan

terlegitimasi. Ketika manajer merasa bahwa operasi perusahaan tidak sesuai lagi dengan kontrak sosial, maka upaya perbaikan perlu dilakukan agar perusahaan tetap memiliki "kontrak" tersebut, dengan cara mengubah persepsi dan pandangan dari masyarakat. Pengungkapan merupakan cara yang tepat untuk mengubah persepsi dan pandangan-pandangan tersebut. Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi (Mahdiyah, 2008).

2.3 Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006).

Hendriksen (1991:203) mendefinisikan pengungkapan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien.

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu informasi yang perlu diungkapkan oleh perusahaan, selain kewajiban perusahaan untuk melaporkan aspek keuangan maupun operasional.

Menurut Elkington (1997) dalam Solihin (2009), salah satu model awal bagi perusahaan dalam menyusun *sustainability report* adalah dengan menggunakan konsep *triple bottom line*. Konsep *triple bottom line* memperhatikan tiga aspek, yakni dampak operasi perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Saat ini *sustainability report* perusahaan-perusahaan hampir di seluruh dunia disusun dengan menggunakan standar pelaporan yang diusulkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI dalam standar pelaporannya memperhatikan tiga indikator/aspek, yaitu indikator ekonomi/keuangan (*economic performance indicators*), indikator lingkungan (*environment performance indicators*), dan indikator sosial (*social performance indicators*).

2.4 Corporate Governance

Corporate governance mengatur pembagian tugas agar perusahaan lebih terarah dan terkendali dalam mencapai tujuan, pengaturan hak dan kewajiban

dalam mencapai keseimbangan kewenangan, dan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mengeluarkan Pedoman Umum GCG, yang di dalamnya menyebutkan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan GCG oleh perusahaan yaitu untuk mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa GCG memiliki keterkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR).

2.5 Karakteristik *Corporate Governance* dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

2.5.1 Ukuran Dewan Komisaris dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Menurut Akhtaruddin *et al.* (2009), semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris yang besar dipandang sebagai

mekanisme *corporate governance* yang efektif untuk mendorong transparansi dan pengungkapan.

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.5.2 Komisaris Independen dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Literatur empiris tentang *corporate governance* menyatakan bahwa level independensi dewan berhubungan dengan komposisi, dan independensi akan memelihara efektivitas dewan tersebut. Komisaris independen dilihat sebagai alat untuk memonitor perilaku manajemen (Rosenstein dan Wyatt, 1990 dalam Said *et al.*, 2009), yang nantinya menghasilkan lebih banyak pengungkapan sukarela mengenai informasi perusahaan. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi yang dianggap dapat mendorong monitoring manajemen dengan lebih baik.

H2: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

2.5.3 Independensi Komite Audit dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Wright (1996), dalam Said *et al.* (2009) menemukan bahwa komposisi komite audit berkaitan erat dengan pelaporan keuangan. Keberadaan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (Ho dan Wong, 2001; Bliss dan Balachandran, 2003 dalam Said *et al.*, 2009). Forker (1992) dalam Said *et al.* (2009), menyatakan bahwa keberadaan komite audit dengan proporsi anggota independen yang lebih besar, dapat mengurangi *agency cost* dan meningkatkan pengendalian internal, yang nantinya akan mengarah pada kualitas pengungkapan yang lebih baik.

H3: Independensi komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

2.5.4 Konsentrasi Kepemilikan dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Abdul Samad (2002) dalam Said *et al.* (2009) berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi mengakibatkan pemegang saham minoritas menjadi *powerless* untuk mencegah pemegang saham mayoritas

dalam penerapan rencana mereka terhadap perusahaan.. Apabila pemegang saham mayoritas beranggapan bahwa pelaksanaan CSR akan mengurangi *return* yang akan mereka peroleh, maka pemegang saham mayoritas dapat memaksa manajemen untuk tidak melaksanakan CSR.

H4: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR.

2.5.5 Kepemilikan Manajerial dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan dan juga untuk menyelaraskan kepentingan antara *shareholders* dan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Huafang dan Jianguo, 2007). Pengungkapan CSR merupakan salah satu cara untuk meningkatkan *image* perusahaan, semakin bagus *image* perusahaan maka harapannya adalah semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, dan *return* yang diperoleh manajemen sebagai pemegang saham akan semakin besar.

H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

2.5.6 Kepemilikan Asing dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari para *stakeholder*-nya dimana secara tipikal berdasarkan atas *home market* (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Suchman, 1995 dalam Barkemeyer, 2007). Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (Machmud dan Djakman, 2008).

H6: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

2.5.7 Kepemilikan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR

Intervensi pemerintah dalam kepemilikan di perusahaan dapat

memberi tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh rakyat. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator, apabila memiliki proporsi saham pada sebuah perusahaan, maka pemerintah memiliki kekuatan untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR.

H7: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian *purposive sampling* dengan kriteria: (1) Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008, karena pada tahun 2008 perusahaan-perusahaan di Indonesia dianggap sudah melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR-nya semenjak diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2) Perusahaan

$$\text{Konsentrasi Kepemilikan (HERF)} = \sum_{i=1}^n (\text{Kepemilikan Pemegang Saham Mayoritas})^2 \quad (3.5)$$

tersebut bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, (3) Perusahaan tersebut mempublikasikan *annual report* tahun 2008 yang dapat diakses melalui *website* BEI (www.idx.co.id).

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan CSR. Metode analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengukur

pengungkapan CSR di dalam *annual report*. Tema yang dicakup di dalam GRI adalah lingkungan, ekonomi, HAM, tenaga kerja dan lingkungan kerja, produk, dan masyarakat, dengan total item yaitu sebanyak 79 item (GRI, 2006). *Disclosure index* digunakan untuk mengetahui seberapa luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Penghitungan indeks dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Disclosure Index} = \frac{\text{Jumlah item informasi CSR yang diungkapkan}}{\text{Jumlah item informasi CSR yang diwajibkan}} \quad (3.1)$$

3.2.2 Variabel Independen

3.2.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang

diangkat, bertugas, dan bertanggungjawab untuk mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi, seperti dalam penelitian Said *et al.* (2009).

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \frac{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}{\text{perusahaan}} \quad (3.2)$$

3.2.2.2 Komisaris Independen

Independensi dewan komisaris diukur dari prosentase jumlah anggota

komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan, seperti dalam penelitian Said *et al.* (2009).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}} \quad (3.3)$$

3.2.2.3 Independensi Komite Audit

Independensi komite audit diukur dari prosentase jumlah anggota komite

audit independen dengan jumlah anggota komite audit, seperti dalam penelitian Said *et al.* (2009).

$$\text{Independensi Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit independen}}{\text{Jumlah anggota komite audit}} \quad (3.4)$$

3.2.2.4 Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan diukur dengan menggunakan Herfindahl Index (HERF), seperti dalam penelitian Makhija dan Patton (2004) dan Jiang dan Habib (2009). Penghitungan

Herfindahl Index (HERF) yaitu jumlah dari kuadrat proporsi kepemilikan pemegang saham terbesar / mayoritas dalam perusahaan, di luar saham yang dimiliki oleh publik.

3.2.2.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial diukur dari prosentase saham yang dimiliki oleh manajemen (dalam hal ini dewan

komisaris, direksi, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan) dengan jumlah saham yang diterbitkan, seperti dalam penelitian Said *et al.* (2009).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \quad (3.6)$$

3.2.2.6 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing diukur dari prosentase saham yang dimiliki oleh

pihak asing dengan jumlah saham yang diterbitkan, seperti dalam penelitian Said *et al.* (2009).

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki oleh pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \quad (3.7)$$

3.2.2.7 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah diukur dari prosentase saham yang dimiliki

oleh pemerintah dengan jumlah saham yang diterbitkan (Said *et al.*, 2009).

$$\frac{\text{Kepemilikan Pemerintah}}{\text{Pemerintah}} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \quad (3.8)$$

3.2.3 Variabel Kontrol

3.2.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diukur dengan total aset yang dimiliki perusahaan pada tahun 2008.

$$\frac{\text{Ukuran Perusahaan}}{\text{Perusahaan}} = \text{Log Total Aset}$$

3.2.3.2 Profitabilitas

Profitabilitas perusahaan diukur dengan *Return on Asset* (ROA).

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Asset}} \quad (3.10)$$

3.3 Model Penelitian

Metode regresi linier berganda (*multiple regression*) digunakan untuk

$$\text{CSDI} = \beta_0 + \beta_1 \text{BDSIZE} + \beta_2 \text{IND} + \beta_3 \text{AC} + \beta_4 \text{CONCERN} + \beta_5 \text{MGROS} +$$

Keterangan:

- CSDI : indeks pengungkapan CSR
- BDSIZE : ukuran dewan komisaris
- IND : komisaris independen
- AC : independensi komite audit
- CONCERN : konsentrasi kepemilikan
- MGR OS : kepemilikan manajerial
- FRGN OS : kepemilikan asing
- GOVT OS : kepemilikan pemerintah
- TA : proksi ukuran perusahaan, *log* total aset
- ROA : proksi profitabilitas, ROA
- ϵ_i : error item

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

$$\beta_6 \text{FRGNOS} + \beta_7 \text{GOVTOS} + \beta_8 \text{TA} + \beta_9 \text{ROA} + \epsilon_i \quad (3.11)$$

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia Stock Exchange (IDX) 2008 diketahui bahwa perusahaan yang terdaftar sebanyak 407 perusahaan. Dari jumlah tersebut, hanya 86 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan (Tabel 4.1).

4.2 Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif (Tabel 4.2) menunjukkan dari 86 responden nilai variabel ukuran dewan komisaris yang terkecil adalah 2 (PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk., PT. Wahana Phonix Mandiri Tbk., PT. ATPK Resources Tbk., dan PT. Aneka

Kemasindo Utama Tbk.) dan nilai variabel ukuran dewan komisaris yang terbesar adalah 10 (PT. International Nickel Indonesia Tbk., PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., dan PT. Astra International Tbk.).

Pada variabel komisaris independen, nilai yang terkecil adalah 30% (PT. International Nickel Indonesia Tbk. dan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.) dan nilai yang terbesar adalah 0,8 atau sebesar 80% (PT. Unilever Indonesia Tbk.). Pada variabel independensi komite audit nilai yang terkecil adalah 75% (PT. Astra International Tbk.) dan nilai yang terbesar adalah 1 atau sebesar 100% (83 perusahaan, kecuali PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT. Medco Energi International Tbk., dan PT. Astra International Tbk.)

Pada variabel konsentrasi kepemilikan, nilai yang terkecil adalah 2,08% (PT. Metrodata Electronics Tbk.) dan nilai yang terbesar adalah sebesar 96,34% (PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.). Pada variabel kepemilikan manajerial, nilai yang terkecil adalah sebesar 0% (total 32 perusahaan) dan nilai yang terbesar 75,12% (PT. Bayan Resources Tbk.).

Pada variabel kepemilikan, nilai yang terkecil adalah 0 atau sebesar 0% (PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk., PT. Selamat Sempurna Tbk., PT. Inter Delta Tbk., PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk., PT. Indofarma (Persero) Tbk., dan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.) dan nilai yang terbesar adalah 98,14% (PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.) dan nilai yang terkecil adalah 0% (total 78 perusahaan, kecuali PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk., PT. Timah (Persero) Tbk., PT. Delta Djakarta Tbk., PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., PT. Indofarma (Persero) Tbk., dan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.) dan nilai yang terbesar sebesar 90,03% (PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.).

Pada variabel ukuran perusahaan (total aset) nilai yang terkecil adalah 9,23700 (PT. Argo Pantes Tbk.) dan nilai yang terbesar adalah 13.90700 (PT. Astra International Tbk.).

Pada variabel profitabilitas (ROA) (Tabel 4.2 pada Lampiran), nilai yang terkecil adalah -0.29000 (PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk.) dan nilai yang terbesar adalah 0.40400 (PT. Astra Agro Lestari Tbk.). Pada variabel

luas pengungkapan CSR (CSDI) (Tabel 4.2 pada Lampiran), nilai yang terkecil adalah 0,06329 (PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk.) dan nilai yang terbesar adalah 0,67089 (PT. Holcim Indonesia Tbk.).

Dari pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa rata-rata luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 (Tabel 4.2) adalah sebesar 20,837 *item* (21 *item*) dari keseluruhan *item* pengungkapan CSR berdasarkan GRI yang berjumlah 79 *item*. Dengan indeks rata-rata sebesar 0,2637621 setiap perusahaan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan pada *annual report* mereka.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari keenam kategori pengungkapan GRI, perusahaan paling banyak melakukan pengungkapan pada kategori lingkungan, yaitu sebesar 31,36%, kategori tenaga kerja sebesar 22,88%, kategori ekonomi sebesar 19,53%, kategori produk sebesar 9,99%, kategori masyarakat sebesar 8,37%, dan yang

terendah adalah kategori hak asasi manusia, yaitu atau sebesar 7,87%.

Perusahaan yang memiliki indeks pengungkapan tertinggi diantara perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang terdaftar di BEI tahun 2008 adalah PT. Holcim Indonesia Tbk (SMCB) dengan pengungkapan sebanyak 53 *item* dari 79 *item* atau dengan indeks sebesar 0,67089. Perusahaan yang memiliki indeks pengungkapan terendah adalah PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) dengan pengungkapan sebanyak 5 *item* dari 79 *item* atau dengan indeks sebesar 0,06329.

Tabel 4.4 pada Lampiran menunjukkan bahwa sektor industri yang memiliki pengungkapan tertinggi pada tahun 2008 adalah *Mining and Mining Services* dengan pengungkapan sebanyak 454 *item* dari keseluruhan *item* yang diwajibkan yang berjumlah 6794 *item*, atau sebesar 6,68%. Sektor industri yang memiliki pengungkapan terendah pada tahun 2008 adalah *Apparel and Other Textile Products* dengan pengungkapan sebanyak 9 *item* dari keseluruhan *item* yang diwajibkan yang berjumlah 6794 *item*, atau sebesar 0,13%.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil dari uji asumsi klasik diketahui bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas (lihat Gambar 4.1, Gambar 4.2. dan Tabel 4.5) Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari multikolinearitas. Dari Gambar 4.3 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Hasil Uji F (*F test*)

Berdasar hasil uji F pada tabel 4.7 diketahui model regresi yang digunakan sudah fit.

4.4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat bahwa model 1 (menggunakan variabel kontrol) memiliki nilai Adjusted R^2 yang lebih besar daripada model 2 (tanpa variabel kontrol) yang menunjukkan bahwa penggunaan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan profitabilitas dalam model regresi mampu meningkatkan kelayakan model regresi.

4.4.3 Hasil Uji Regresi Parsial (Uji *t*)

Berdasarkan hasil pengujian statistik (Tabel 4.9), hasil pengujian hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran dewan komisari terhadap luas pengungkapan CSR, dapat diketahui bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan CSR sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Sulastini (2007), Akhtaruddin *et al.* (2009), dan Erwansyah (2009), namun konsisten dengan hasil penelitian Matoussi dan Chakroun (2008). Hasil yang tidak signifikan disebabkan karena ukuran dewan komisaris merupakan sebuah masalah, ukuran dewan komisaris yang besar akan menimbulkan masalah dalam koordinasi, sedangkan di sisi lain, ukuran dewan komisaris yang kecil akan memudahkan masalah koordinasi, namun anggotanya dapat mengalami kekurangan pengalaman dan kompetensi dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil pengujian variabel komisaris independen (IND) terhadap luas pengungkapan CSR (CSDI), dapat diketahui bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan

CSR. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007) dan Akhtaruddin *et al.* (2009).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2009), yang juga menyatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen yang ada dalam dewan komisaris tidak menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas.

Che Ahmad *et al.* (2003) dalam Hashim dan Devi (2008) menjelaskan alasan mengenai hasil yang tidak signifikan ini kemungkinan karena komisaris independen tampaknya tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, sebab mereka tidak terlibat dalam operasional rutin perusahaan, atau bisa juga karena komisaris independen tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Kapabilitas komisaris independen dalam rangka monitoring juga akan terbatas apabila pihak-pihak yang terafiliasi (non-independen) mendominasi dan mengendalikan dewan komisaris (Abdullah, 2004; Abdul Rahman dan Mohamed Ali (2006) dalam Hashim dan Devi, 2008).

Hasil pengujian variabel independensi komite audit (AC) terhadap luas pengungkapan CSR (CSDI), telah menunjukkan terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari independensi komite audit terhadap luas pengungkapan CSR. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Said *et al.* (2009). Faktor yang mungkin berpengaruh adalah independensi komite audit tidak didukung oleh kompetensi yang dimiliki para anggotanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia, meskipun seluruh anggota komite auditnya adalah pihak independen.

Dari hasil pengujian variabel konsentrasi kepemilikan (CONCERN) terhadap luas pengungkapan CSR (CSDI), dapat diketahui bahwa variabel konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap luas pengungkapan CSR, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Said *et al.* (2009) dan Huafang dan Jianguo

(2007). Namun penelitian ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan hasil penelitian Ghazali (2007) dan Matoussi dan Chakroun (2008).

Menurut Ghazali (2007), hasil yang tidak signifikan ini kemungkinan disebabkan karena tidak adanya klasifikasi konsentrasi kepemilikan. Arah yang berlawanan antara kepemilikan manajerial (negatif) dengan kepemilikan asing dan pemerintah (positif), menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan perlu diklasifikasi. Penelitian oleh Jiang dan Habib (2009) dengan mengklasifikasikan konsentrasi kepemilikan dan dengan menggunakan Herfindahl Index (HERF) sebagai pengukurannya, berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara konsentrasi kepemilikan terhadap luas pengungkapan sukarela.

Berdasarkan hasil pengujian variabel kepemilikan manajerial (MGROS) terhadap luas pengungkapan CSR (CSDI), dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap luas pengungkapan CSR sehingga hipotesis kelima (H5) ditolak. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Rosmasita (2007) dan

Anggraini (2006), yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sebaliknya, hasil yang tidak signifikan ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Huafang dan Jianguo (2007).

Hasil yang tidak signifikan ini kemungkinan disebabkan karena dua alasan. Pertama, karena jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial terlalu rendah untuk memberikan *return* sebagai dorongan yang efektif bagi manajerial. Kedua, saham yang dimiliki manajerial merupakan sebagai dorongan (*encouragement*), dan dorongan ini bukan karena perilaku yang baik, tetapi karena kualifikasi manajer, sehingga tidak akan memberikan dorongan yang efektif (Huafang dan Jianguo, 2007). Kemungkinan selanjutnya adalah manajer melakukan mekanisme lain untuk memiliki saham perusahaan, yaitu dengan menggunakan perusahaan miliknya untuk memiliki saham, dengan begitu manajer secara tidak langsung dapat mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel kepemilikan asing (FRGNOS) terhadap variabel luas pengungkapan CSR (CSDI), dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan

asing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap luas pengungkapan CSR, sehingga hipotesis keenam (H6) ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Said *et al.* (2009), Machmud dan Djakman (2008), serta Amran dan Devi (2008). Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Puspitasari (2009) dan Huafang dan Jianguo (2007) yang menunjukkan hasil yang positif dan signifikan.

Machmud dan Djakman (2008) menjelaskan alasan mengapa adanya kepemilikan asing dalam perusahaan di Indonesia tidak meningkatkan indeks GRI sebagai ukuran CSR adalah adanya kemungkinan jika kepemilikan asing ini dikonsolidasikan dengan perusahaan induk di negara asal maka presentase kepemilikan tersebut sangat kecil, sehingga mereka menjadi kurang memperhatikan pengungkapan CSR sebagai suatu hal yang penting untuk diungkapkan kepada publik. Hasil yang diharapkan adalah kebudayaan pelaporan (*reporting culture*) perusahaan asing akan mempengaruhi anak perusahaan atau afiliasi, kemungkinan perusahaan asing atau multinasional lebih memilih menggunakan media alternatif lain

daripada *annual report* untuk tujuan CSR mereka (Amran dan Devi, 2008).

Hasil penelitian oleh Puspitasari (2009) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil yang berbeda ini kemungkinan disebabkan karena pada tahun 2008, jumlah investor asing di Indonesia mengalami penurunan. Penelitian oleh Puspitasari (2009) berdasarkan pada data 2007, sedangkan penelitian ini menggunakan data 2008. Pada tahun 2008 telah terjadi penurunan kepemilikan saham oleh investor asing, hal ini dapat dilihat dari *net purchasing* tahun 2007 sebesar Rp 32 triliun sedangkan pada tahun 2008 menjadi Rp 18 triliun. Penurunan *net purchasing* disebabkan karena investor asing banyak menjual sahamnya.

Dari hasil pengujian variabel kepemilikan pemerintah (GOVTOS) terhadap luas pengungkapan CSR (CSDI), dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR, sehingga hipotesis ketujuh (H7) gagal ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Said *et al.* (2009) dan Amran dan Devi (2008). Sebaliknya, hasil

penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Huafang dan Jianguo (2007).

Adanya hubungan yang signifikan antara kepemilikan pemerintah terhadap luas pengungkapan CSR mengandung arti bahwa semakin besar proporsi saham yang dimiliki pemerintah dalam perusahaan, maka akan memperluas tingkat pengungkapan CSR. Intervensi pemerintah dalam kepemilikan di perusahaan, dapat memberi tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh rakyat (Said *et al.*, 2009).

Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator, apabila memiliki proporsi saham yang besar pada sebuah perusahaan, maka pemerintah memiliki kekuatan untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan negara/pemerintah (BUMN) mendapat *treatment* yang berbeda mengenai CSR, karena adanya Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan. Adanya peraturan ini mewajibkan BUMN untuk menyisihkan laba bersih maksimal sebesar 2% untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) apabila dipandang dari perspektif bisnis, merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* (CSR).

Hasil ini juga didukung dengan pengujian statistik lebih lanjut yang bertujuan untuk membandingkan luas pengungkapan CSR antara perusahaan pemerintah dan non-pemerintah. Berdasarkan hasil uji beda *t-test* (Tabel 4.10 pada Lampiran), terlihat bahwa rata-rata luas pengungkapan antara perusahaan pemerintah dan perusahaan non-pemerintah berbeda secara signifikan.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik, dapat diambil kesimpulan bahwa hanya faktor kepemilikan pemerintahlah yang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan

CSR di antara berbagai mekanisme corporate governance di Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu periode pengamatan terbatas hanya selama satu tahun, dan unsur subjektivitas dalam *content analysis* untuk mengukur pengungkapan CSR.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah periode pengamatan sebaiknya diperluas, dan mengurangi unsur subjektivitas dalam *content analysis* untuk mengukur pengungkapan CSR dengan melibatkan peneliti lain untuk melakukan penilaian ulang dalam rangka *crosscheck*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghnia, Arifatul. 2007. "Analisis Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan dan Tipe Kepemilikan terhadap Kualitas Laba dan Luas Pengungkapan Sukarela". *Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Akhtaruddin, M., M. Hossain, dan L. Yao. 2009. "Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms". *JAMAR*. Vol. 7 · Number 1, hal. 1-20.
- Alsaed, Khalid. 2006. "The Association Between Firm-Specific Characteristics and Disclosure: The Case of Saudi Arabia". *Managerial Auditing Journal*. Vol. 21, No. 5, hal. 476-496
- Amran, Azlan dan S. Susela Devi. 2008. "The Impact Of Government And Foreign Affiliate Influence On Corporate Social Reporting (The Case Of Malaysia)". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 23, No. 4, hal. 386-404.
- Anggraini, Fr. RR. 2006. "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Jakarta)". *Simposium Nasional Akuntansi 9*.
- Barkemeyer, Ralf. 2007. "Legitimacy as a Key Driver and Determinant of CSR in Developing Countries": *Sustainable Development Research Centre*. Scotland.
- Deegan, Craig. 2002. "Introduction The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure-a Theoretical Foundation". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 15, No. 3, hal. 282-311.
- Deegan, Craig dan M. Rankin. 1996. "Do Australian Companies Report Environmental News Objectively? An Analysis of Environmental Disclosures by Firms Prosecuted

- Successfully by the Environmental Protection Authority". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 9, No. 2, hal. 50-67.
- Erwansyah, Widy. 2009. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2009. SPSS. *Analisis Multivariate Dengan Program*
- Gray, R., R. Kouhy, dan S. Lavers. 1995. "Corporate Social and Environmental Reporting A Review of The Literature and A Longitudinal Study of UK Disclosure". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, hal 47-77.
- Jiang, H dan A. Habib. 2009. "The Impact of Different types of Ownership concentration on annual report voluntary disclosures in New Zealand". *Accounting Research Journal*, Vol 22 Issue 3 Page 275-304
- Hackston, D., dan M.J. Milne. 1996. "Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 9, No. 1, hal 77-108.
- Huafang, X dan Y. Jianguo. 2007. "Ownership Structure, Board Composition, and Corporate Voluntary Disclosure Evidence from Listed Companies in China". *Managerial Auditing Journal*. Vol. 22. No. 6. Hal 604-619.
- Inawesnia, Kania. 2008. "Motif Dibalik Praktik dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*: Dari Stakeholder ke Award (Studi Kasus pada PT. SPSS. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Ghozali, I dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Global Reporting Initiative. 2006. "G3 Guidelines". <http://www.globalreporting.org>, diakses 22 Oktober 2009.
- Gossling, T dan C Vocht. 2007. "Social Role Conception and CSR Policy Success". *Journal of Business Ethics*. Vol. 74, hal. 363-372.
- Holcim Indonesia, Tbk)". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Jensen, Michael C dan W. H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. Vol. 3. No. 4. Hal. 305-360.
- Machmud, Novita dan Chaerul D. Djakman. 2008. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006". *Simposium Nasional Akuntansi 11*.
- Mahdiyah, Fathimatul. 2008. "Analisis Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Makhija, Anil K dan James M. Patton. 2004. "The Impact of Firm Ownership Structure on Voluntary Disclosure: Empirical Evidence from Czech Annual Reports".

- Journal of Business*. Vol. 77. No. 3. Hal. 457-491.
- Matoussi, H dan R. Chakroun. 2008. "Board Composition, Ownership Structure, and Voluntary Disclosure in Annual Reports: Evidence from Tunisia". *Labaratoire Interdisciplinaire de Gestion Université-Entreprise (LIGUE)*. ISCAE
- Nasir, M dan S.N. Abdullah. 2004. "Voluntary Disclosure and Corporate Governance among Financially Distressed Firms in Malaysia". *Financial Reporting, Regulation, and Governance*. Vol. 3. No. 1
- Nugroho, Adianto. 2008. "Pengaruh Implementasi Struktur Kepemilikan, Struktur *Good Corporate Governance*, dan Rasio Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di BEI 2002-2006)". *Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Poolthong, Y dan R. Mandhachitara. 2009. "Customer Expectations of CSR, Perceived Service Quality and Brand Effect in Thai Retail Banking". *International Journal of Bank Marketing*. Vol. 27 No. 6. Hal 408-427.
- Puspitasari, Daning Apriani. 2009. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Rosmasita, H. 2007. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (*Social Disclosure*) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta". *Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Islam Indonesia.
- Said, R., Y. Zainuddin, dan H. Haron. 2009. "The Relationship Between Corporate Social responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies". *Social Responsibility Journal*. Vol. 5, No. 2, Hal. 212-226.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". *Simposium Nasional Akuntansi 8*. Solo.
- Setiawan, Anita Carolina. 2007. "Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan (*Tobin's Q*)". *Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Salemba 4. Jakarta
- Sulastini, Sri. 2007. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap *Social Disclosure* Perusahaan Manufaktur yang Telah *Go Public*". *Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Negeri Semarang.
- Wijayanti, Deshinta. 2009. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Keuangan dan Non Keuangan yang *Listing* di BEI 2006-2007)". *Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.